

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan dan mengetahui potensi sektor perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan kontribusi sektor perekonomian di tingkat kabupaten/kota terhadap total output keseluruhan dengan kontribusi sektor perekonomian di tingkat provinsi terhadap total output di provinsi. Analisis LQ juga digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang termasuk dalam golongan sektor basis atau non basis.

Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya sektor tersebut lebih unggul atau dominan di tingkat kabupaten/kota dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Selain itu nilai $LQ > 1$ dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa kabupaten/kota mengalami surplus dalam sektor tersebut. Sebaliknya, apabila nilai $LQ < 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis, artinya peranan sektor lebih kecil di kabupaten/kota dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi.

Sektor Basis merupakan sektor yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya wilayahnya sendiri serta mampu melakukan kegiatan ekspor barang dan jasa ke wilayah lain diluar wilayah perekonomiannya. Sedangkan sektor non-basis merupakan sektor yang belum bisa memenuhi

kebutuhannya, sehingga sektor di Kabupaten Banjarnegara yang termasuk dalam sektor non basis perlu mengimpor dari luar daerah

Adapun hasil perhitungan dari analisis *Location Question* (LQ) Kabupaten Banjarnegara dijelaskan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 5. 1
Hasil penelitian Location Quotien (LQ) Kabupaten Banjarnegara berdasarkan sektor lapangan usaha tahun 2010-2014

Kategori	Lapangan Usaha	Rata-rata LQ Tahun 2011-2015
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2.181357368
B	pertambangan dan Penggalian	2.876502388
C	Industri Pengolahan	0.357263194
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.282620296
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.678295673
F	Konstruksi	0.665815088
G	Perdagangan Besar dan Eceran	1.110368411
H	Transportasi dan Pergudangan	1.286692216
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.639167081
J	Informasi dan Komunikasi	0.809257553
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.044184027
L	Real Estate	0.960966219
M.N	Jasa Perusahaan	1.135858682
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.353616727
P	Jasa Pendidikan	1.50390537
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.560047347
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.48485028
	Produk Domestik Regional Bruto	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Banjarnegara (data diolah kembali)

Berdasarkan uraian laju LQ per sektor pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara pada periode tahun 2011 sampai dengan 2015 memiliki sepuluh sektor basis dan tujuh sektor non-

basis. Sektor basis tersebut yaitu sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ yang diartikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Adapun sepuluh sektor basis tersebut yaitu adalah (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2.18), (2) Sektor Pertambangan dan Penggalian (2.88) (3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1.11), (4) Sektor Transportasi dan Perdagangan (1.29), (5) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (1.04), (6) Sektor Perusahaan (1.14), (7) Sektor Administrasi Pemerintahan (1.35), (8) Sektor Jasa Pendidikan (1.50), (9) Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1.56), dan (10) Sektor Jasa Lainnya (1.48).

Sedangkan tujuh sektor lainnya berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa $LQ < 1$ artinya sektor tersebut masuk dalam anggota sektor non basis atau bukan termasuk sektor unggulan di Kabupaten Banjarnegara. Adapun tujuh sektor yang termasuk kedalam sektor non basis yaitu; (1) Sektor Real Estate (0.96), (2) Sektor Informasi dan Komunikasi (0.80), (3) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0.64), (4) Sektor Bangunan (0.67), (5) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah (0.68), (6) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0.28), (7) Sektor Industri Pengolahan (0.36).

Berdasarkan perhitungan diatas, yang memiliki nilai LQ tertinggi dari hasil analisis LQ diatas yaitu sektor pertambangan dan penggalian

sebesar 2.88 disusul dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan yaitu sebesar 2.81 dan delapan sektor lainnya memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 namun kurang dari 2. Namun dalam hal ini peneliti tidak memilih sektor pertambangan dan penggalian untuk dianalisis lebih lanjut untuk menentukan subsektor unggulan dalam rangka pembangunan ekonomi daerah Banjarnegara. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Banjarnegara wewenang pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah daerah Banjarnegara tidak memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola kegiatan dalam sektor pertambangan dan penggalian.
2. Sumber daya dari sektor pertambangan dan penggalian merupakan jenis sumber daya yang dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola secara benar, dan termasuk dalam kategori yang tidak dapat diperbaharui jadi ketersediannya tidak dapat dipastikan.
3. Proses pengelolaan di sektor pertambangan dan penggalian dalam hal proses produksi memerlukan biaya yang tinggi sehingga disebutkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang high cost.

Dari uraian diatas menjadi beberapa alasan yang digunakan penulis bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang

unggulan tapi tidak untuk jangka panjang di Kabupaten Banjarnegara. Sehingga penulis memilih sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor unggulan dan dapat mendorong pembangunan daerah serta dapat dianalisis lebih lanjut melalui subsektor unggulannya. Selain itu, alasan yang digunakan penulis dalam memilih sektor pertanian, kehutanan dan perikanan karena berdasarkan RPJP Banjarnegara menyebutkan tujuan umum pembangunan daerah Banjarnegara adalah sesuai dengan visi “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Dengan demikian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang sudah sepatutnya menjadi focus perhatian Pemerintah Banjarnegara untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan Daerah.

B. Analysis Hierarche Process (AHP)

AHP merupakan metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini berfungsi untuk membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik pada saat pengambilan keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu. AHP merupakan teknik pengambilan keputusan matematis yang mempertimbangkan aspek kualitatif maupun kuantitatif dalam pengambilan keputusan, selain itu faktor yang diperhatikan dalam metode AHP yaitu faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi.

Dalam penelitian ini, metode AHP digunakan untuk menentukan sub sektor unggulan dari sektor pertanian dengan menggunakan beberapa kriteria dan alternative kriteria.

1. Penentuan Bobot Tujuan Kriteria Subsektor Unggulan dari Sektor Pertanian

Hierarchy tingkat pertama yaitu menentukan tingkat kepentingan antar masing-masing tujuan kriteria. Adapun tujuan kriterianya yaitu: pertumbuhan subsektor, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing.

Tabel 5. 2
Hasil perhitungan bobot tujuan AHP

No	Tujuan Kriteria	<i>Priority Vector</i>
1	Pertumbuhan Subsektor	0.554455146
2	Penyerapan Tenaga Kerja	0.233318869
3	Peningkatan Daya Saing	0.212225985

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa tujuan kriteria yang memiliki *priority vector* tertinggi adalah pertumbuhan sub sektor yaitu 0.554455146 (55%), sedangkan tujuan kriteria penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing secara berturut-turut memiliki nilai *priority vector* 0.233318869 (23%) dan 0.212225985 (21%).

Dengan demikian dalam menentukan subsektor unggulan dari sektor pertanian tujuan kriteria yang paling penting digunakan adalah pertumbuhan subsektor dengan nilai bobot kepentingan sebesar 55%,

berikutnya tujuan kriteria peningkatan daya saing dengan nilai bobot kepentingan 23% dan tujuan kriteria peningkatan daya saing yaitu 21%.

2. Penentuan Penetapan subsektor unggulan dengan menggunakan alternative kriteria

a. Perhitungan kriteria bahan baku untuk menentukan subsektor pertanian

Perbandingan berpasangan untuk kriteria bahan baku pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 3

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria bahan baku

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.545036
2	Hortikultura	0.189868
3	Perkebunan	0.072204
4	Perikanan	0.128393
5	Peternakan	0.064499

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria bahan baku yaitu tanaman pangan menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.545 atau 54.5%, kemudian prioritas kedua subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.1899 atau 18.99%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.1284 atau 12.84%, prioritas keempat subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.072 atau 7.2% dan prioritas kelima yaitu subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.064 atau 6.4%.

b. Perhitungan kriteria IPTEK untuk menentukan subsektor pertanian

Perbandingan berpasangan untuk kriteria IPTEK pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 4

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria IPTEK

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.453467
2	Hortikultura	0.127826
3	Perkebunan	0.085292
4	Perikanan	0.165729
5	Peternakan	0.167686

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria IPTEK yaitu tanaman pangan menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.4534 atau 45.34%, kemudian prioritas kedua subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.1677 atau 16.77%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.1657 atau 16.57%, prioritas keempat subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.1278 atau 12.78% dan prioritas kelima yaitu subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.085 atau 8.5%.

c. Perhitungan kriteria mutu tenaga kerja

Perbandingan berpasangan untuk kriteria mutu tenaga kerja pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan,

perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 5

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria mutu tenaga kerja

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.237071
2	Hortikultura	0.429255
3	Perkebunan	0.105141
4	Perikanan	0.2282
5	Peternakan	0.130561

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria mutu tenaga kerja yaitu hortikultura menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.4292 atau 42.92%, kemudian prioritas kedua subsektor tanaman pangan dengan nilai bobot 0.2370 atau 23.70%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.2282 atau 22.82%, prioritas keempat subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.1305 atau 1.05% dan prioritas kelima yaitu subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.1051 atau 10.51%.

d. Perhitungan kriteria nilai produksi

Perbandingan berpasangan untuk kriteria nilai produksi pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan

dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Dari hasil perhitungan pada tabel diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria nilai produksi yaitu perkebunan menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.4154 atau 41.54%, kemudian prioritas kedua subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.3461 atau 34.61%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor tanaman pangan dengan nilai bobot 0.2198 atau 21.98%, prioritas keempat subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.2038 atau 20.38% dan prioritas kelima yaitu subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.078 atau 7.8%.

Tabel 5. 6

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria nilai produksi

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.219789
2	Hortikultura	0.346132
3	Perkebunan	0.415427
4	Perikanan	0.203766
5	Peternakan	0.07819

e. Perhitungan kriteria upah untuk menentukan subsektor pertanian

Perbandingan berpasangan untuk kriteria upah pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5.7

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria upah

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.231014
2	Hortikultura	0.26682
3	Perkebunan	0.144335
4	Perikanan	0.216915
5	Peternakan	0.095031

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria upah yaitu hortikultura menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.2668 atau 26.68%, kemudian prioritas kedua subsektor tanaman pangan

dengan nilai bobot 0.2310 atau 23.10%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.2169 atau 21.69%, prioritas keempat subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.1443 atau 14.43% dan prioritas kelima yaitu subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.095 atau 9.5%.

- f. Perhitungan kriteria nilai investasi untuk menentukan subsektor pertanian Perbandingan berpasangan untuk kriteria nilai investasi pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 8

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria nilai investasi

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.230781
2	Hortikultura	0.205574
3	Perkebunan	0.129392
4	Perikanan	0.162099
5	Peternakan	0.14604

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria nilai investasi yaitu tanaman pangan menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.2308 atau 23.08%, kemudian prioritas kedua subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.2056 atau 20.56%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.1621 atau 16.21%, prioritas keempat subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.1460 atau 14.60% dan prioritas kelima yaitu subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.1294 atau 12.94%.

- g. Perhitungan kriteria infrastruktur untuk menentukan subsektor pertanian
- Perbandingan berpasangan untuk kriteria infrastruktur pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 9

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria infrastruktur

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.384967
2	Hortikultura	0.147328
3	Perkebunan	0.166584
4	Perikanan	0.128043
5	Peternakan	0.068252

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria infrastruktur yaitu tanaman pangan menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.3850 atau 38.50%, kemudian prioritas kedua subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.1666 atau 16.66%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.1473 atau 14.73%, prioritas keempat subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.1280 atau 12.80% dan prioritas kelima yaitu subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.068 atau 6.8%.

h. Perhitungan kriteria birokrasi untuk menentukan subsektor pertanian

Perbandingan berpasangan untuk kriteria birokrasi pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura,

perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 10

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria birokrasi

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.311855
2	Hortikultura	0.180197
3	Perkebunan	0.081452
4	Perikanan	0.155545
5	Peternakan	0.109655

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria birokrasi yaitu tanaman pangan menjadi subsektor yang unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.3118 atau 31.18%, kemudian prioritas kedua subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.1802 atau 18.02%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.1555 atau 15.55%, prioritas keempat subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.1096 atau 10.96% dan

prioritas kelima yaitu subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.081 atau 8.1%.

- i. Perhitungan kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menentukan subsektor pertanian

Perbandingan berpasangan untuk kriteria SDM pada lima subsektor dari sektor pertanian, yaitu: perbandingan tanaman pangan dengan hortikultura, perbandingan tanaman pangan dengan perkebunan, perbandingan tanaman pangan dengan perikanan, perbandingan tanaman pangan dengan peternakan, perbandingan hortikultura dengan perkebunan, perbandingan hortikultura dengan perikanan, perbandingan hortikultura dengan peternakan, perbandingan perkebunan dengan perikanan, perbandingan perkebunan dengan peternakan, dan perbandingan perikanan dengan peternakan.

Tabel 5. 11

Hasil Perhitungan bobot kepentingan subsektor pertanian dengan kriteria Sumber Daya Manusia

No	Jenis Subsektor	Priority Vektor
1	Tanaman Pangan	0.390707
2	Hortikultura	0.183257
3	Perkebunan	0.088088
4	Perikanan	0.100753
5	Peternakan	0.155845

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas local untuk kriteria SDM yaitu tanaman pangan menjadi subsektor yang

unggulan dan prioritas pertama dengan nilai bobot kepentingan sebesar 0.3907 atau 39.07%, kemudian prioritas kedua subsektor hortikultura dengan nilai bobot 0.1832 atau 18.32%, selanjutnya prioritas ketiga subsektor peternakan dengan nilai bobot 0.1558 atau 15.58%, prioritas keempat subsektor perikanan dengan nilai bobot 0.1007 atau 10.07% dan prioritas kelima yaitu subsektor perkebunan dengan nilai bobot 0.088 atau 8.8%.

3. Penentuan Bobot pilihan Subsektor Unggulan dari Sektor Pertanian

Hierarchy tingkat terakhir yaitu menentukan tingkat kepentingan antar masing-masing pilihan subsektor.

Tabel 5. 12
Hasil perhitungan bobot pilihan subsektor pertanian

No	Tujuan Kriteria	<i>Priority Vector</i>
1	Tanaman Pangan	0.443101
2	Hortikultura	0.159385
3	Perkebunan	0.095314
4	Perikanan	0.133514
5	Peternakan	0.074537

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa subsektor yang memiliki *priority vector* tertinggi adalah Tanaman Pangan yaitu 0.4431 (44.31%), sedangkan subsektor hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan secara berturut-turut memiliki nilai *priority vector* 0.1594 (15.94%), 0.1335 (13.35%), 0.095 (9.5%) dan 0.074 (7.4%).

Dengan demikian subsektor unggulan dari sektor pertanian adalah tanaman pangan dengan nilai bobot kepentingan sebesar 44.31% sebagai prioritas pertama, berikutnya subsektor hortikultura dengan nilai bobot kepentingan 15.94% , sub sektor perikanan dengan bobot nilai 13.35%, subsektor perkebunan dengan bobot nilai 9.5% dan peternakan sebagai prioritas terakhir dengan bobot nilai 7.4%.

4. Perhitungan Total Rangking atau Prioritas Global

- a. Dari seluruh pilihan kriteria yang dilakukan dalam menentukan subsektor unggulan diperoleh faktor pilihan kriteria total, yaitu :

Tabel 5. 13
Matriks pilihan kriteria total

	TP	Hor	PKB	PRK	PTK
A1	0.545036	0.189868	0.072204	0.128393	0.064499
A2	0.453467	0.127826	0.085292	0.165729	0.167686
A3	0.237071	0.429255	0.105141	0.2282	0.130561
B1	0.219789	0.346132	0.415427	0.203766	0.07819
B2	0.231014	0.26682	0.144335	0.216915	0.095031
A1 : Bahan Baku	$\frac{1}{7}$	B1 : Nilai Produksi	$\frac{2}{32}$	C1: Infrastruktur	
A2 : IPTEK	$\frac{5}{7}$	B2 : Upah	$\frac{3}{52}$	C2 : Birokrasi	
A3 : Mutu tenaga kerja	$\frac{7}{7}$	B3 : Nilai Investasi	$\frac{3}{38}$	C3 : Sumber Daya Manusia	

rangan :

TP : Tanaman Pangan

PRK : Perikanan

Hor : Hortikultura

PTK : Peternakan

PKB : Perkebunan

b. Total Rangkaing atau Prioritas Global

Total ranking atau prioritas global diperoleh dengan mengalikan matriks

					pilihan	kriteria	total
0.545036	0.189868	0.072204	0.128393	0.064499	dengan	0.443100844	0.159384607
0.453467	0.127826	0.085292	0.165729	0.167686			
0.237071	0.429255	0.105141	0.2282	0.130561	bobot	0.095314209	0.133514403
0.219789	0.346132	0.415427	0.203766	0.07819			
0.231014	0.26682	0.144335	0.216915	0.095031	pilhan	0.074536536	
0.230781	0.205574	0.129392	0.162099	0.14604			
0.384967	0.147328	0.166584	0.128043	0.068252	subsektor, yaitu:		
0.311855	0.180197	0.081452	0.155545	0.109655			
0.390707	0.183257	0.088088	0.100753	0.155845			
X							0.30059983
							0.26406048
							0.2236841
							0.22518638
Hasilnya yaitu					=		0.19469122

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil perkalian matriks antara matriks pilihan kriteria total dengan matriks pilihan subsektor, dan hasilnya merupakan keputusan pilihan yang diambil. Hasil perhitungan keputusan diatas diperoleh urutan prioritas global yaitu subsektor tanaman pangan menjadi prioritas utama dengan bobot nilai

30.06%, kemudian subsektor hortikultura dengan bobot nilai 26.4%, selanjutnya subsektor perikanan dengan bobot nilai 22.52%, subsektor perkebunan dengan bobot nilai 22.37% dan prioritas terakhir yaitu peternakan 19.47%.

Penentuan urutan prioritas tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan urutan subsektor unggulan dari sektor pertanian. Subsektor unggulan dari sektor pertanian tersebut yaitu subsektor tanaman pangan karena memiliki bobot nilai prioritas global tertinggi kemudian subsektor hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan secara berurutan.

B. Penentuan Strategi Pengembangan Subsektor Unggulan sebagai Pembangunan Daerah

Berdasarkan urutan perhitungan diatas telah didapatkan urutan subsektor unggulan dari sektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Adapun berdasarkan perhitungan bobot tujuan kriteria yang memiliki nilai bobot tertinggi dan menjadi prioritas utama yaitu kriteria pertumbuhan subsektor. Sedangkan untuk kriteria penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing merupakan prioritas kedua dan ketiga setelah kriteria pertumbuhan subsektor.

Dengan demikian dalam rangka mengelola subsektor pertanian, kriteria yang harus diperhatikan sebagai prioritas pertama yaitu mengelola pertumbuhan subsektor. Hal yang dilakukan dalam mengelola pertumbuhan

subsektor yang pertama, yaitu dengan memperhatikan bahan baku yang tersedia yang kemudian disebut sebagai modal. Selain masalah ketersediaan, pengelolaan bahan baku juga harus memperhatikan tujuan pertanian Kabupaten Banjarnegara dalam jangka panjang yaitu membentuk “pertanian industry”. Hal yang dilakukan dalam pencapaian pertanian industry adalah pengelolaan bahan baku local secara optimal untuk mendapatkan “*value*” lebih dalam penjualan.

Kedua, dalam pencapaian pertumbuhan subsektor kriteria IPTEK merupakan faktor yang mempengaruhinya. Kriteria IPTEK meliputi pengelolaan kegiatan pertanian yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara. Pertanian yang maju merupakan pertanian yang tidak selamanya bersandar pada pertanian tradisional yang hanya berfokus pada kekuatan fisik tenaga kerja. Kemajuan IPTEK merupakan solusi bagi suatu daerah yang ingin lebih mengembangkan kegiatan usahanya menjadi lebih modern dan efisien dengan ketersediaan teknologi. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus memperhatikan tentang kemajuan dan pemanfaatan IPTEK yang digunakan dalam kegiatan pertanian dalam rangka pencapaian pertumbuhan subsektor.

Ketiga, dalam pencapaian pertumbuhan subsektor kriteria yang digunakan yaitu mutu tenaga kerja. Mutu tenaga kerja meliputi bagaimana tenaga kerja mampu mengelola kegiatan pertanian yang berorientasi pada pembangunan daerah. Artinya tenaga kerja dalam mengelola kegiatan

pertanian tidak hanya berfokus pada tanam, panen tapi lebih dari pada itu. Tenaga kerja yang memiliki mutu artinya tenaga kerja yang paham bagaimana mengelola kegiatan pertanian secara efisien dan optimal. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki mutu bagus adalah tenaga kerja yang mampu memanfaatkan kehadiran IPTEK untuk mengelola pertanian. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus meningkatkan mutu tenaga kerja di bidang pertanian dengan memberikan pelatihan pemahaman dan pemanfaatan IPTEK yang digunakan dalam kegiatan pertanian, pelatihan pengelolaan pertanian optimal dan lain sebagainya.

Setelah melakukan fokus strategi dengan memperhatikan pertumbuhan subsektor sebagai prioritas utamanya, maka strategi selanjutnya yang dilakukan yaitu focus pada penyerapan tenaga kerja dengan memperhatikan nilai produksi subsektor, upah tenaga kerja, dan nilai investasi yang diberikan dari subsektor tersebut. Sedangkan kriteria terakhir yang menjadi strategi yaitu peningkatan daya saing dengan fokus perhatiannya pada masalah infrastruktur, birokrasi dan sumber daya manusia dari segi kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dan kuantitasnya.